



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

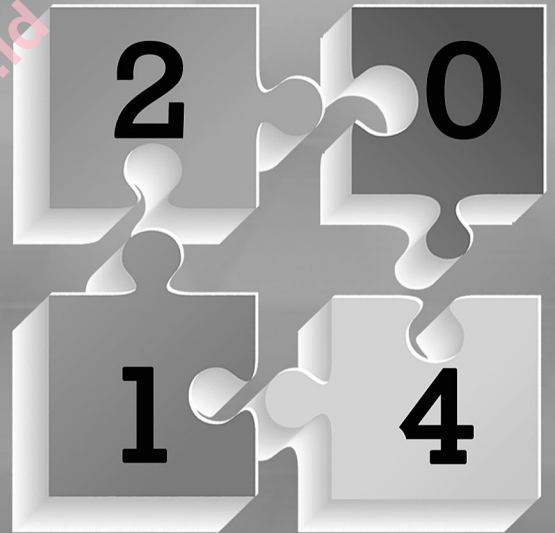


PROVINSI SUMATERA UTARA





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT



PROVINSI SUMATERA UTARA



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA 2014

ISSN : 2356-1122
No. Katalog BPS : 4102004.12
No. Publikasi : 12520.1510
Ukuran Buku : 27,94 cm x 21,59 cm
Jumlah Halaman : vii + 54 hal

Naskah:

Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggungjawab : Ir. Wien Kusdiatmono, M.M.
- Editor : Drs. Ramlan, M.M.
- Koordinator : Dadan Supriadi
- Anggota : Baha Marihot H. Siahaan, Kurnia

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jalan Asrama No. 179 Medan 20123
☎ (061) 8452343 Fax. (061) 8452773
Home Page : <http://sumut.bps.go.id> Email : bps1200@bps.go.id

*"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara"*

KATA PENGANTAR

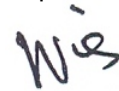
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara telah dapat menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara.

Dalam publikasi ini disajikan indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, kemiskinan, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan perumahan.

Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya sehingga publikasi ini dapat terwujud. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Medan, Oktober 2015
BPS Provinsi Sumatera Utara
Kepala,



Ir. Wien Kusdiatmono, M.M.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sumber Data	2
1.4. Sistematika Penyajian	
II. PENJELASAN TEKNIS	3
2.1. Kependudukan	3
2.2. Pendidikan	4
2.3. Kesehatan	4
2.4. Fertilitas dan Keluarga Berencana	5
2.5. Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga	5
2.6. Ketenagakerjaan	6
2.7. Perumahan	7
III. KEPENDUDUKAN	8
3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	9
3.2. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	11
3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk	13
IV. PENDIDIKAN	15
4.1. Angka Partisipasi Sekolah	16
4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	17
4.3. Angka Buta Huruf	20
V. KESEHATAN	22
5.1. Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)	23
5.2. Penolong Kelahiran	24
5.3. Angka Harapan Hidup	26
VI. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	27
6.1. Usia Perkawinan Pertama	27
6.2. Keluarga Berencana	30
VII. KEMISKINAN, POLA KONSUMSI DAN IPM	33
7.1. Kemiskinan	33
7.2. Pola Konsumsi	35
7.3. Pembangunan Manusia	38

	<i>Halaman</i>
VIII. KETENAGAKERJAAN	41
8.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	42
8.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	42
8.3. Karakteristik Penduduk Bekerja	44
8.3.1. Lapangan Pekerjaan	44
8.3.2. Status Pekerjaan	46
8.3.3. Jam Kerja Seminggu	47
IX. PERUMAHAN	48
9.1. Kondisi Rumah	49
9.2. Fasilitas Rumah	51

<http://sumut.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota 2000-2010	10
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin, 2014	12
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota, 2014	14
Table 4.1. Persentase Penduduk 10 ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014	19
Table 4.2. Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/kota, 2014	22
Tabel 6.1. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara, 2014	28
Tabel 6.2. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/cara KB menurut Kabupaten/kota, 2014	31
Tabel 6.3. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/kota dan Alat/cara KB yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara, 2014	32
Tabel 7.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Sumatera Utara, Maret 2014	34
Tabel 7.2. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 1995-2014	35
Tabel 7.3. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/kota, 2014	37
Tabel 7.4. Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia	38
Tabel 7.5. Perkembangan Tingkatan dan Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota, 2013-2014	40
Tabel 8.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2012-2014	42
Tabel 8.2. Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun ke Atas menurut Kabupaten/kota dan Kegiatan serta TPT dan TPAK, 2014	43
Tabel 8.3. Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Usaha, 2014	45
Tabel 9.1. Kondisi Perumahan Sumatera Utara, 2012-2014	50
Tabel 9.2. Kondisi Fasilitas Rumah Sumatera Utara, 2012-2014	52
Tabel 9.3. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2014	52
Tabel 9.4. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2014	53

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Grafik 3.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara, 1961-2010	9
Grafik 4.1. Perkembangan Partisipasi Sekolah Penduduk Sumatera Utara, 2010-2014	17
Grafik 4.2. Persentase Penduduk Sumatera menurut Pendidikan Ditamatkan, 2010-2014	18
Grafik 4.3. Perkembangan Tingkat Buta Huruf Penduduk Sumatera Utara, 2010-2014	20
Grafik 5.1. Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Sumatera Utara, 2010-201	23
Grafik 5.2. Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri dengan Cara Pengobatannya Provinsi Sumatera Utara, 2014	24
Grafik 5.3. Persentase Penolong Persalinan Bayi Provinsi Sumatera Utara, 2010-2014	25
Grafik 5.4. Kecenderungan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, SP71-SP2010	26
Grafik 6.1. Persentase Perempuan dengan Usia Kawin Pertama Di Bawah 17 Tahun menurut Kabupaten/kota, 2014	30
Grafik 7.1. Trend Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara, 1999-2014	34
Grafik 7.2. Perkembangan IPM Sumatera Utara, 2010– 2014	39
Grafik 8.1. Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara menurut Lapangan Pekerjaan, 2010-2014	44
Grafik 8.2. Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara menurut Status Pekerjaan, 2014	46
Grafik 8.3. Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara menurut jam Kerja Seminggu, 2014	47
Grafik 9.1. Persentase Rumah Tangga di Sumatera Utara menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2014	49
Grafik 9.2. Persentase Rumah Tangga di Sumatera Utara yang Mempunyai Lantai Terluas dari Tanah, 2014	51
Grafik 9.3. Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Sumatera Utara, 2014	54

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan secara eksplisit telah dituangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan secara eksplisit telah dituangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

1.2. Tujuan

Penulisan Indikator kesejahteraan Rakyat 2014 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan kejelasan mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun

kebijakan yang disusun akan bersifat efektif dan efisien, utamanya untuk segera melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi yang berdasarkan indikator-indikator yang ada. Pada akhirnya usaha Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2014. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi pendidikan di Sumatera Utara, dari sisi kualitas pendidikan penduduk. kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya pada bagian lima. Aspek fertilitas dan keluarga berencana dibahas pada bagian enam. Aspek kemiskinan, pola konsumsi dan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) serta ketenagakerjaan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian indikator kesejahteraan rakyat Sumatera Utara 2014 pada aspek perumahan yaitu pada bagian sembilan.

METODOLOGI

2.1. Kependudukan

- Tipe daerah, penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-1.249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan nilai delapan yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8.500 orang per km².

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-8. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga pertanian, nilai dua jika 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, jika desa mempunyai 5 persen rumah tangga pertanian atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan namun jaraknya masih relatif dekat atau mudah mencapainya maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan sedangkan desa dengan skor maksimum 9 dikategorikan sebagai perdesaan.

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.

- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

2.2. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.3. Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.

- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

2.4. Fertilitas dan keluarga Berencana

- Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernapas dan menangis.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun

2.5. Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.6. Ketenagakerjaan

- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

2.7. Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk suatu negara akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yang ditentukan oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Jumlah penduduk yang besar secara teoritis merupakan modal pembangunan yang potensial, akan tetapi juga dapat memicu berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang dan papan. Kondisi ini menjadikan penduduk lebih diposisikan sebagai beban pembangunan daripada sebagai modal pembangunan. Masalah kependudukan yang saat ini dihadapi antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk yang tidak merata serta kualitas penduduk yang relatif masih rendah. Oleh sebab itu untuk kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengarahkan mobilitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk yang didukung sistem informasi kependudukan yang handal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang lebih luas.

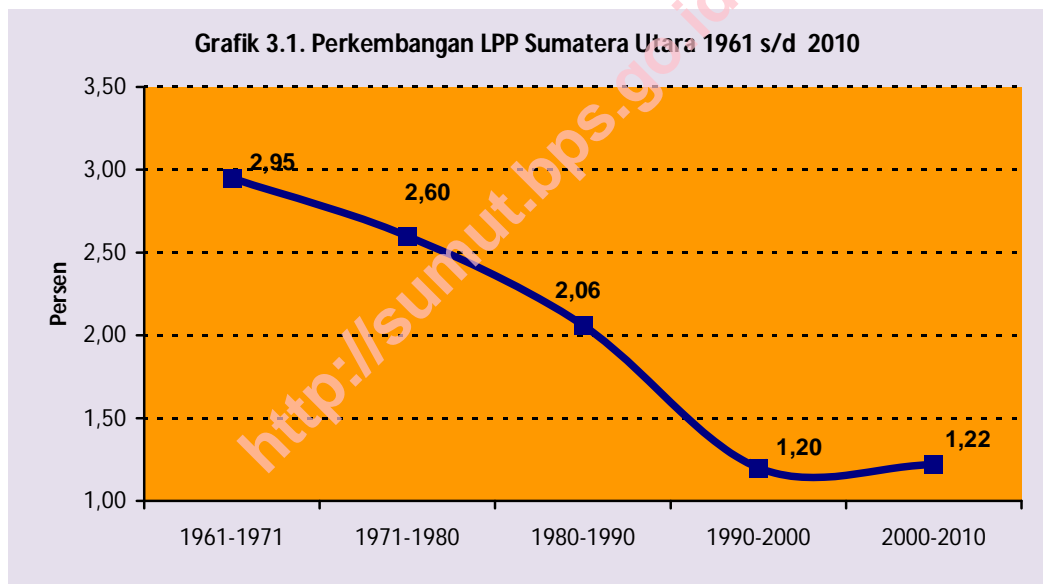
Salah satu cara untuk melihat sejauh mana beban tanggungan penduduk adalah dengan melihat komposisi penduduk menurut struktur umur. ketidakseimbangan komposisi antara kelompok umur produktif dengan non produktif akan menyebabkan permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Demikian juga halnya dengan distribusi atau penyebaran penduduk antar wilayah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemerataan hasil pembangunan. Penduduk biasanya akan melakukan migrasi ke wilayah yang terdapat fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibanding wilayah yang ditempati sebelumnya

Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian. ketiga komponen ini turut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pertahanan.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang terkait di antaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk serta data struktur umur penduduk.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Sumatera Utara tercatat sebesar 12.982.204 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade (1961-2010) terus mengalami penurunan. Pada periode 1961-1971 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tercatat 2,95 persen kemudian turun menjadi 2,60 persen dan 2,06 persen periode 1971-1980 dan 1980-1990. Angka laju pertumbuhan penduduk tersebut kembali turun pada periode 1990-2000 yaitu menjadi 1,20 persen. Selanjutnya periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara adalah sebesar 1,22 persen (*Grafik 3.1*). Diperkirakan pada tahun 2013 jumlah penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.326.307 jiwa seperti tercantum pada Tabel 3.2.



Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Sumatera Utara perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan program-program pembangunan lainnya yang dilaksanakan.

Tabel 3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota, 2000-2010

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)		Laju Pertumbuhan/ tahun (%) 2000-2010
	2000	2010	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	683 416	131 377	1,03
2. Mandailing Natal	359 849	404 945	1,20
3. Tapanuli Selatan	734 364	263 812	2,12
4. Tapanuli Tengah	244 679	311 232	2,46
5. Tapanuli Utara	407 711	279 257	1,02
6. Toba Samosir	304 125	173 129	-0,38
7. Labuhanbatu	844 924	415 110	1,95
8. Asahan	935 855	668 272	1,11
9. Simalungun	855 802	817 720	-0,46
10. Dairi	292 857	270 053	0,59
11. Karo	283 713	350 960	2,17
12. Deli Serdang	1 959 488	1 790 431	2,00
13. Langkat	906 565	967 535	0,66
14. Nias Selatan	1)	289 708	x
15. Humbang Hasundutan	1)	171 650	x
16. Pakpak Barat	1)	40 505	x
17. Samosir	1)	119 653	x
18. Serdang Bedagai	1)	593 711	x
19. Batubara	1)	375 885	x
20. Padang Lawas Utara	1)	223 531	x
21. Padang Lawas	1)	225 259	x
22. Labuhanbatu Selatan	1)	277 673	x
23. Labuhanbatu Utara	1)	330 701	x
24. Nias Utara	1)	127 244	x
25. Nias Barat	1)	81 807	x
Kota			
26. Sibolga	82 310	84 481	0,26
27. Tanjungbalai	132 438	154 445	1,56
28. Pematangsiantar	241 524	234 697	-0,29
29. Tebing Tinggi	125 006	145 248	1,52
30. Medan	1 905 587	2 097 612	0,97
31. Binjai	213 760	246 154	1,43
32. Padangsidimpuan	1)	191 531	x
33. Gunungsitoli	1)	126 202	x
Sumatera Utara	11 513 973	12 982 204	1,22

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara dan Hasil SP2010

Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang, Asahan dan Tapsel)

x) Data tidak tersedia

Pada Tabel 3.1. ditampilkan jumlah penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota serta laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat merupakan tiga Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling banyak, masing-masing berjumlah 2.097.612 jiwa, 1.790.431 jiwa dan 967.535 jiwa. Sebaliknya Pakpak Bharat memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu berjumlah 40.505 jiwa. Dilihat laju pertumbuhan penduduknya, beberapa Kabupaten/kota yang relatif tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,46 persen, dan Kabupaten Karo 2,17 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah disebabkan daerah ini menjadi pusat perkembangan ekonomi baru di pantai barat dan daerah transit dari beberapa kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. Sedangkan tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo yang merupakan salah satu daerah agraris utama yang termasuk dalam kawasan agropolitan di Sumatera Utara kemungkinan menjadi daya tarik bagi penduduk kabupaten lain di sekitarnya untuk melakukan perpindahan ke daerah tersebut. Sebaliknya, beberapa daerah lain di Sumatera Utara, laju pertumbuhan penduduknya sangat rendah antara lain Kabupaten Simalungun sebesar minus 0,46 persen, Kabupaten Toba Samosir sebesar minus 0,38 persen dan Kota Pematangsiantar minus 0,29 persen.

3.2. Rasio Jenis kelamin (*Sex Ratio*)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Jumlah penduduk perempuan di Sumatera Utara umumnya selalu lebih banyak dari penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2014 diketahui jumlah penduduk Sumatera Utara adalah sebesar 13.766.851 jiwa yang terdiri dari 6.868.587 jiwa laki-laki dan perempuan 6.898.264 jiwa atau dengan sex ratio sebesar 99,57 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,57 penduduk laki-laki.

Berdasarkan Kabupaten/kota, pada tahun 2014 rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 103,97 diikuti Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara yaitu masing-masing sebesar 102,04 dan 101,94. Hal ini dapat diduga karena daerah ini umumnya adalah daerah potensi perkebunan, yang menampung laki-laki untuk terjun dalam usaha perkebunan atau sebagai buruh perkebunan dan pertanian lainnya. Sebaliknya Kabupaten Nias Barat adalah kabupaten dengan sex ratio paling kecil yaitu 91,67 diikuti kabupaten lainnya yang ada di Pulau Nias. Kondisi ini menunjukkan bahwa umumnya penduduk laki-laki di wilayah tersebut cenderung pergi keluar untuk bekerja atau bersekolah.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota, dan Jenis kelamin, 2014

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Nias	65 933	69 386	135 319	95,02
2. Mandailing Natal	209 401	216 981	426 382	96,51
3. Tapanuli Selatan	135 707	137 425	273 132	98,75
4. Tapanuli Tengah	172 037	170 865	342 902	100,69
5. Tapanuli Utara	143 794	147 070	290 864	97,77
6. Toba Samosir	88 680	89 888	178 568	98,66
7. Labuhanbatu	229 110	224 520	453 630	102,04
8. Asahan	351 415	348 305	699 720	100,89
9. Simalungun	420 591	423 442	844 033	99,33
10. Dairi	138 608	138 967	277 575	99,74
11. Karo	189 815	192 807	382 622	98,45
12. Deli Serdang	998 669	985 929	1 984 598	101,29
13. Langkat	506 513	499 452	1 005 965	101,41
14. Nias Selatan	151 380	153 630	305 010	98,54
15. Humbang Hasundutan	89 906	91 120	181 026	98,67
16. Pakpak Bharat	22 435	22 085	44 520	101,58
17. Samosir	61 080	61 985	123 065	98,54
18. Serdang Bedagai	304 403	301 964	606 367	100,81
19. Batubara	199 508	196 971	396 479	101,29
20. Padang Lawas Utara	124 229	123 057	247 286	100,95
21. Padang Lawas	126 313	125 614	251 927	100,56
22. Labuhanbatu Selatan	156 578	150 593	307 171	103,97
23. Labuhanbatu Utara	175 405	172 060	347 465	101,94
24. Nias Utara	65 705	67 030	132 735	98,02
25. Nias Barat	40 375	44 044	84 419	91,67
Kota				
26. Sibolga	43 280	42 886	86 166	100,92
27. Tanjungbalai	83 006	81 669	164 675	101,64
28. Pematangsiantar	119 582	125 522	245 104	95,27
29. Tebing Tinggi	76 488	78 316	154 804	97,67
30. Medan	1 081 797	1 109 343	2 191 140	97,52
31. Binjai	130 551	130 939	261 490	99,70
32. Padangsidimpuan	100 642	105 854	206 496	95,08
33. Gunungsitoli	65 651	68 545	134 196	95,78
Sumatera Utara	6 868 587	6 898 264	13 766 851	99,57

Sumber : Proyeksi Penduduk

3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Salah satu masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing Kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah perdesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang luasnya 265,10 kilometer persegi atau 0,37 persen dari luas daratan Sumatera Utara, adalah kota terpadat yang setiap kilometer perseginya ditempati 8.009 jiwa. Kota Sibolga yang berada di Pantai Barat Sumatera Utara, dengan luas hanya 0,02 persen dari luas daratan Sumatera Utara adalah kota terpadat kedua dengan kepadatan penduduk mencapai 7.983 jiwa/km². Pada umumnya daerah perkotaan mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk melakukan migrasi. Sebaliknya, tingkat kepadatan penduduk yang rendah tersebar di wilayah kabupaten di Sumatera Utara. Kabupaten Pakpak Bharat hanya dihuni oleh 35 jiwa per kilometer persegi, diikuti Kabupaten Samosir yaitu 50 jiwa per kilometer persegi.

**Tabel 3.3. Jumlah Penduduk, kepadatan dan Distribusi Penduduk
Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota, 2014**

Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Distribusi Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	135 319	136	1,01
2. Mandailing Natal	426 382	62	3,11
3. Tapanuli Selatan	273 132	62	2,03
4. Tapanuli Tengah	342 902	150	2,41
5. Tapanuli Utara	290 864	76	2,15
6. Toba Samosir	178 568	74	1,32
7. Labuhanbatu	453 630	168	3,21
8. Asahan	699 720	185	5,13
9. Simalungun	844 033	191	6,29
10. Dairi	277 575	143	2,07
11. Karo	382 622	171	2,72
12. Deli Serdang	1 984 598	759	13,97
13. Langkat	1 005 965	156	7,39
14. Nias Selatan	305 010	182	2,23
15. Humbang Hasundutan	181 026	77	1,32
16. Pakpak Barat	44 520	35	0,31
17. Samosir	123 065	50	0,92
18. Serdang Bedagai	606 367	317	4,57
19. Batubara	396 479	423	2,88
20. Padang Lawas Utara	247 286	59	1,73
21. Padang Lawas	251 927	61	1,76
22. Labuhanbatu Selatan	307 171	93	2,16
23. Labuhanbatu Utara	347 465	95	2,54
24. Nias Utara	132 735	86	0,97
25. Nias Barat	84 419	152	0,63
Kota			
71. Sibolga	86 166	7 983	0,65
72. Tanjungbalai	164 675	2 578	1,19
73. Pematangsiantar	245 104	2 969	1,79
74. Tebing Tinggi	154 804	3 878	1,12
75. Medan	2 191 140	8 009	16,06
76. Binjai	261 490	2 795	1,89
77. Padangsidempuan	206 496	1 785	1,50
78. Gunungsitoli	134 196	276	0,97
Sumatera Utara	13 766 851	186	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 dan pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan amanat yang harus dilaksanakan bangsa ini karena pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran pendidikan yang sangat penting tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain ditandai dengan unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja yang berkualitas secara perorangan dan kelompok. Beberapa cara untuk menampilkan hasil kerja produktif di antaranya dengan mengasah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan formal. Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dengan melalui perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian juga tidak kalah pentingnya peningkatan ketersediaan informasi pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals (MDGs)* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

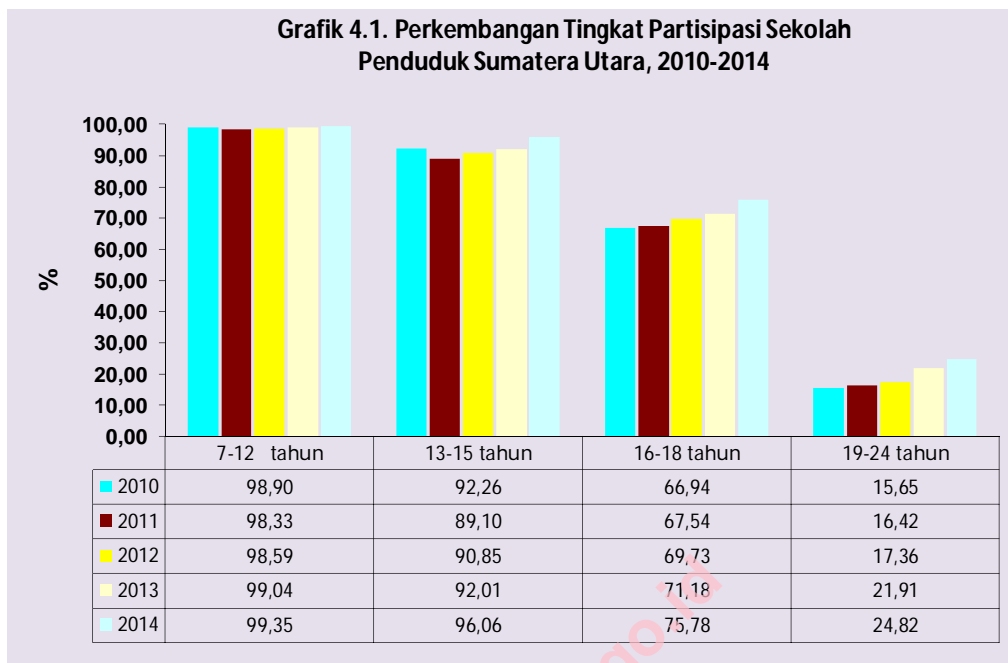
Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijakan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

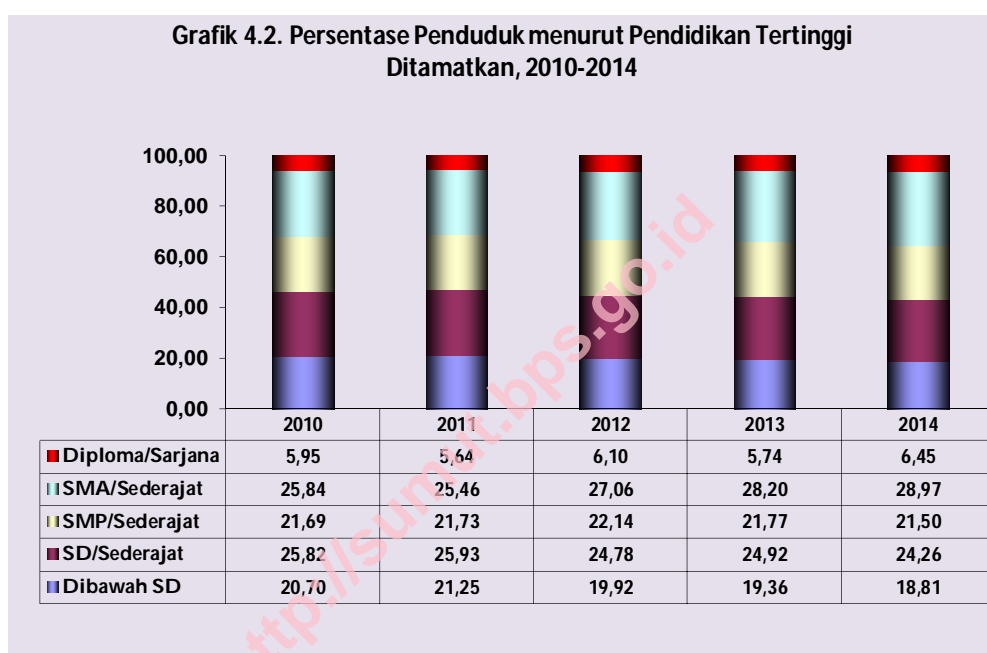


Grafik 4.1. menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Sumatera Utara. Pada usia 7-12 tahun meningkat dari 98,90 persen pada tahun 2010 menjadi 99,35 persen pada tahun 2014 demikian halnya pada kelompok umur 13-15 yang meningkat dari 92,26 persen menjadi 96,06 persen pada tahun yang sama. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun, di mana keduanya menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada kelompok umur 16-18 meningkat dari 66,94 persen pada tahun 2010 menjadi 75,78 persen pada tahun 2014 dan kelompok umur 19-24 tahun meningkat dari 16,42 persen menjadi 24,82 persen pada tahun yang sama.

4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Dari Grafik 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Sumatera Utara pada tahun 2010 sampai 2014 dapat dikatakan terjadi peningkatan. Pada tahun 2014 persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA/Sederajat adalah sebanyak 35,42 persen meningkat dibanding tahun 2010 yang sebesar 31,79 persen. Sebaliknya penduduk yang berpendidikan maksimal SD/Sederajat mengalami penurunan dari 46,52 persen pada tahun 2010 menjadi 43,07 persen pada tahun 2014.



Kondisi tingkat pendidikan menurut Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 4.1. Hal menarik yang perlu diperhatikan adalah kabupaten yang berada di Pulau Nias. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah di 3 kabupaten tersebut sangat tinggi, yaitu di Nias Selatan mencapai 21,78 persen, Nias 14,04 persen, dan Nias Barat 13,44 persen. Jika dibandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan atas di perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan.

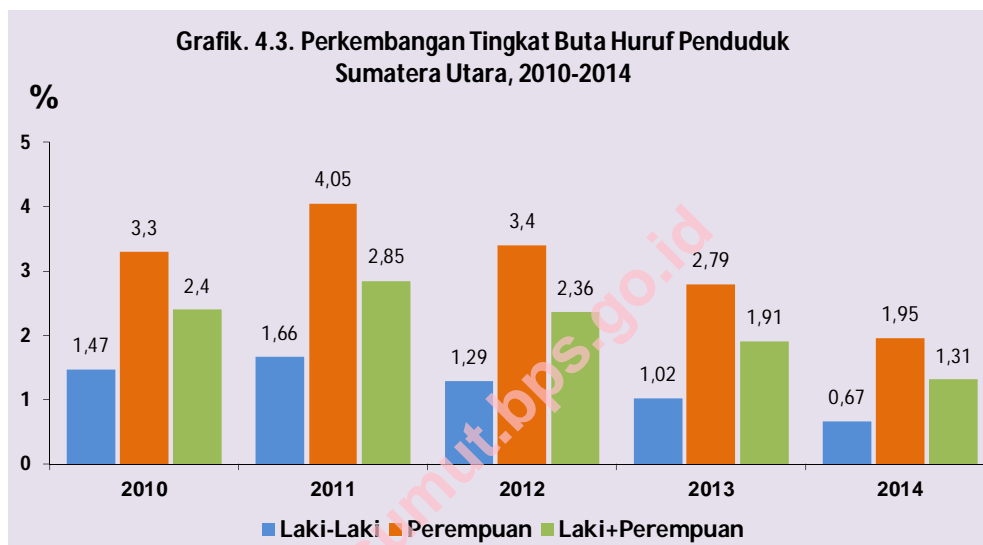
Tabel 4.1. Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Kabupaten/kota	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan yang Ditamatkan						
			SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	SMK	D1/D2	D3	D4/S1/ S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten									
1. Nias	14,04	36,15	24,98	12,26	7,70	2,25	0,46	0,55	1,61
2. Mandailing Natal	1,02	24,94	34,62	18,88	13,61	2,90	0,18	0,84	3,01
3. Tapanuli Selatan	0,46	21,37	31,82	20,93	16,95	4,40	0,15	1,08	2,84
4. Tapanuli Tengah	3,09	25,60	25,36	22,41	14,09	4,00	0,32	1,65	3,48
5. Tapanuli Utara	1,04	21,22	22,90	23,14	17,30	8,24	1,09	1,30	3,77
6. Toba Samosir	0,69	13,19	20,59	27,11	21,14	11,03	1,17	1,62	3,46
7. Labuhanbatu	0,31	13,83	33,13	22,93	20,21	3,21	0,31	1,99	4,08
8. Asahan	1,17	19,98	30,00	20,83	17,96	5,88	0,46	1,38	2,34
9. Simalungun	1,28	17,62	25,40	22,21	19,85	7,64	0,71	1,62	3,68
10. Dairi	1,22	19,86	26,05	26,63	16,47	6,00	0,34	1,53	1,90
11. Karo	0,75	15,11	24,98	21,64	25,75	5,02	0,63	1,99	4,12
12. Deli Serdang	1,08	14,04	19,98	22,00	28,85	8,09	0,43	1,23	4,30
13. Langkat	1,96	19,88	26,59	23,51	19,47	5,67	0,26	0,61	2,05
14. Nias Selatan	21,78	26,43	26,79	13,24	8,40	0,65	0,39	0,54	1,79
15. Humbang Hasundutan	1,63	19,76	24,60	25,89	17,54	6,23	0,65	0,72	2,97
16. Pakpak Barat	1,30	24,82	26,48	21,11	13,74	4,26	0,61	1,11	6,57
17. Samosir	1,90	23,32	23,09	20,17	20,63	5,12	0,61	1,34	3,82
18. Serdang Bedagai	1,45	19,61	27,12	24,01	17,65	7,15	0,27	0,53	2,22
19. Batubara	1,41	23,35	29,59	22,04	16,24	3,61	0,87	0,59	2,31
20. Padang Lawas Utara	1,04	19,56	29,60	24,06	18,74	3,40	0,42	0,92	2,25
21. Padang Lawas	0,89	22,69	32,95	22,75	15,01	1,77	0,21	0,59	3,13
22. Labuhanbatu Selatan	0,87	16,31	23,36	28,95	24,95	3,36	0,15	0,39	1,65
23. Labuhanbatu Utara	0,66	17,73	28,59	24,59	19,85	5,34	0,02	0,87	2,35
24. Nias Utara	5,35	32,37	30,49	16,35	9,33	2,84	0,35	0,95	1,96
25. Nias Barat	13,44	27,97	23,33	18,08	11,69	1,71	0,70	0,75	2,34
Kota									
71. Sibolga	0,72	16,92	21,14	22,65	26,20	5,60	0,50	1,78	4,50
72. Tanjungbalai	1,00	18,08	27,64	21,14	21,88	4,55	1,01	1,54	3,16
73. Pematangsiantar	0,25	11,64	16,37	20,16	30,72	9,84	0,85	3,32	6,85
74. Tebing Tinggi	0,55	8,03	24,03	25,59	24,37	9,88	0,67	1,95	4,94
75. Medan	0,88	9,06	17,25	18,65	34,27	6,52	0,36	2,89	10,12
76. Binjai	0,55	11,22	22,03	22,24	30,47	6,73	0,51	1,42	4,83
77. Padangsidimpuan	0,31	14,83	22,85	16,83	27,26	7,70	0,47	2,47	7,28
78. Gunungsitoli	5,00	24,92	22,58	16,56	16,23	3,82	0,31	2,07	8,50
Sumatera Utara	1,82	17,00	24,26	21,50	23,00	5,98	0,44	1,51	4,50
• Perkotaan	0,85	12,71	19,96	20,93	29,17	7,10	0,48	2,08	6,70
• Perdesaan	2,79	21,31	28,60	22,07	16,78	4,84	0,40	0,92	2,30

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

4.3. Angka Buta Huruf

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf) untuk penduduk 10 tahun. Tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa.



Selama periode 2010 sampai 2014, tingkat buta huruf penduduk Sumatera Utara menunjukkan penurunan, yaitu dari 2,40 persen pada tahun 2010 menjadi 1,31 persen pada tahun 2014. Hal yang cukup menarik adalah tingginya tingkat buta huruf perempuan dibanding laki-laki. Pada tahun 2010 tingkat buta huruf perempuan mencapai 3,30 persen lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 1,47 persen. Kondisi tahun 2014 tidak berbeda yaitu tingkat buta huruf perempuan masih lebih tinggi yaitu 1,95 persen dibanding laki-laki sebesar 0,67 persen.

Tabel 4.2 menunjukkan persentase penduduk yang buta huruf menurut Kabupaten/kota. Kabupaten Nias Selatan mempunyai persentase penduduk yang buta huruf mencapai angka 21,06 persen diikuti Nias 15,61 persen dan Nias Barat 12,23 persen. Tingginya angka buta huruf di daerah tersebut disebabkan antara lain sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas, baik menuju ke daerah tersebut maupun antar desa atau kecamatan

Tabel 4.2 Tingkat Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk 10 tahun ke Atas menurut Kabupaten/kota dan Jenis kelamin, 2014

Kabupaten/kota	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Nias	93,59	6,41	76,20	23,80	84,39	15,61
2. Mandailing Natal	99,90	0,10	99,14	0,86	99,51	0,49
3. Tapanuli Selatan	99,88	0,12	99,05	0,95	99,46	0,54
4. Tapanuli Tengah	98,74	1,26	97,92	2,08	98,33	1,67
5. Tapanuli Utara	99,76	0,24	98,27	1,73	99,00	1,00
6. Toba Samosir	100,00	0,00	98,97	1,03	99,47	0,53
7. Labuhanbatu	100,00	0,00	99,49	0,51	99,75	0,25
8. Asahan	99,86	0,14	99,81	0,19	99,84	0,16
9. Simalungun	99,73	0,27	98,54	1,46	99,13	0,87
10. Dairi	99,27	0,73	99,47	0,53	99,37	0,63
11. Karo	99,84	0,16	99,45	0,55	99,64	0,36
12. Deli Serdang	99,95	0,05	98,85	1,15	99,40	0,60
13. Langkat	99,28	0,72	98,77	1,23	99,02	0,98
14. Nias Selatan	84,86	15,14	73,16	26,84	78,94	21,06
15. Humbang Hasundutan	99,92	0,08	96,60	3,40	98,23	1,77
16. Pakpak Barat	99,49	0,51	98,06	1,94	98,77	1,23
17. Samosir	99,75	0,25	99,86	0,14	99,81	0,19
18. Serdang Bedagai	99,32	0,68	97,08	2,92	98,20	1,80
19. Batubara	99,30	0,70	99,65	0,35	99,48	0,52
20. Padang Lawas Utara	99,42	0,58	99,35	0,65	99,38	0,62
21. Padang Lawas	99,99	0,01	100,00	0,00	99,99	0,01
22. Labuhanbatu Selatan	100,00	0,00	99,47	0,53	99,74	0,26
23. Labuhanbatu Utara	99,72	0,28	100,00	0,00	99,86	0,14
24. Nias Utara	99,16	0,84	89,04	10,96	94,00	6,00
25. Nias Barat	95,38	4,62	81,09	18,91	87,77	12,23
Kota						
71. Sibolga	99,63	0,37	98,93	1,07	99,28	0,72
72. Tanjungbalai	99,91	0,09	99,87	0,13	99,89	0,11
73. Pematangsiantar	100,00	0,00	99,60	0,40	99,79	0,21
74. Tebing Tinggi	99,96	0,04	99,83	0,17	99,90	0,10
75. Medan	99,95	0,05	99,70	0,30	99,83	0,17
76. Binjai	99,76	0,24	99,76	0,24	99,76	0,24
77. Padangsidimpuan	99,79	0,21	99,71	0,29	99,75	0,25
78. Gunungsitoli	98,15	1,85	90,85	9,15	94,36	5,64
Sumatera Utara	99,33	0,67	98,05	1,95	99,28	0,72
• Perkotaan	99,90	0,10	99,36	0,64	99,89	0,11
• Perdesaan	98,76	1,24	96,72	3,28	99,79	0,21

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

KESEHATAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia.. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan.

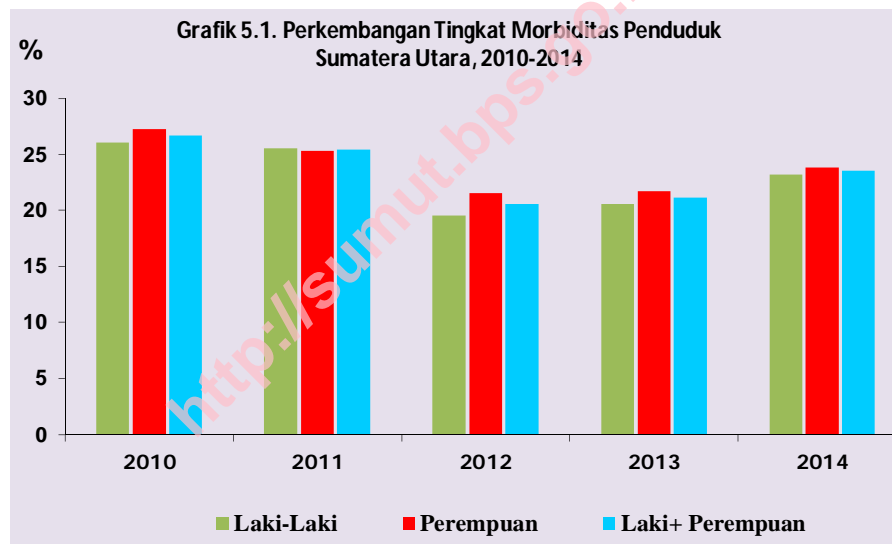
Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

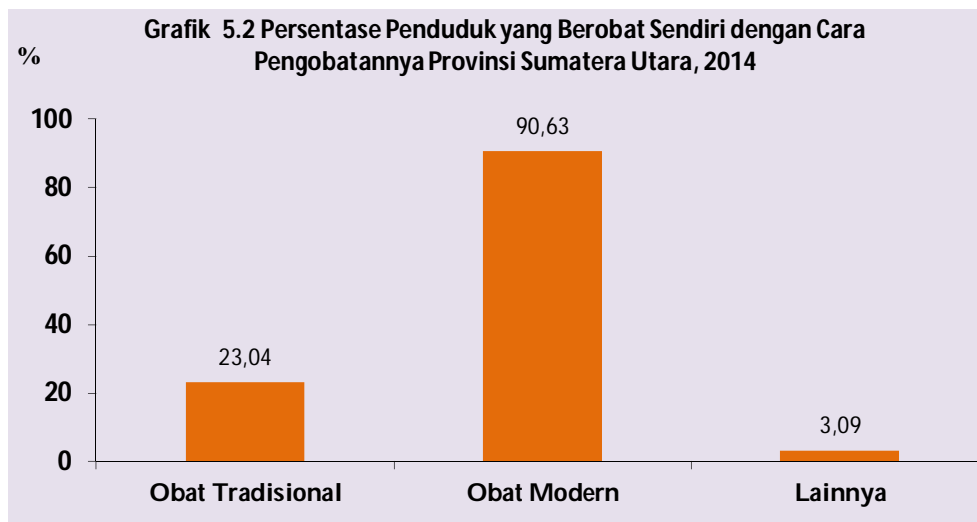
5.1. Angka kesakitan (*Morbidity Rate*)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Sejak tahun 2010, tingkat morbiditas di Sumatera Utara menunjukkan pola yang menurun yang berarti tingkat kesehatan penduduk Sumatera Utara dapat dikatakan menaik. Pada tahun 2010 sebanyak 26,68 persen penduduk Sumatera Utara mengalami keluhan kesehatan. kemudian turun menjadi 25,44 dan 20,55 persen pada tahun 2011 dan 2012 dan selanjutnya pada dua tahun terakhir mulai meningkat sedikit menjadi 21,14 persen dan 23,55 persen pada tahun 2013 dan 2014. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya perempuan lebih banyak menderita keluhan kesehatan.



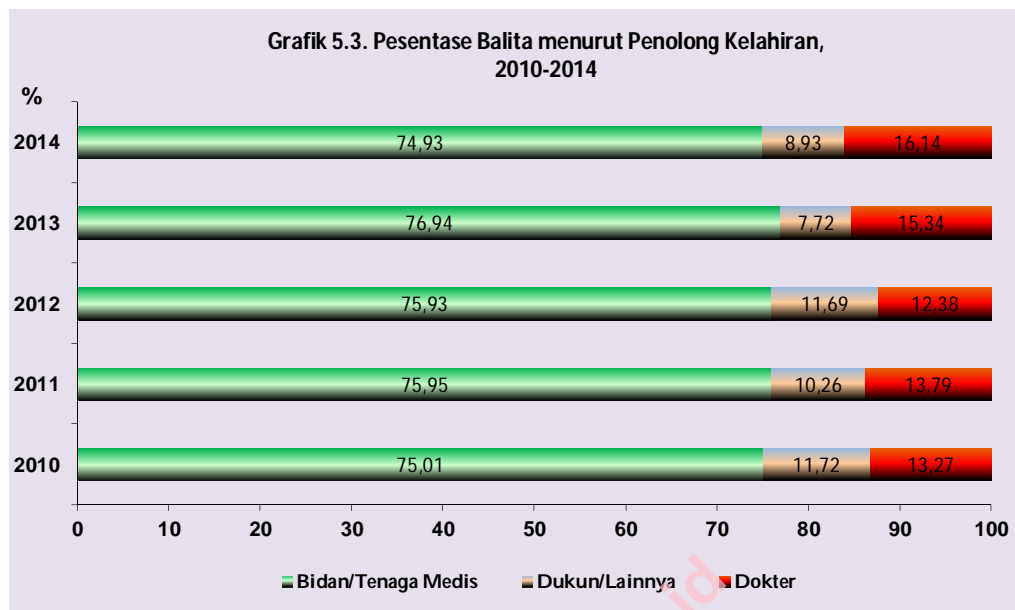
Selanjutnya Grafik 5.2 menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri selama sebulan yang lalu. Berdasarkan data Susenas 2014 penduduk Sumatera Utara yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat sendiri, mayoritas mengkonsumsi obat modern yaitu sebanyak 90,63 persen, kemudian yang mengkonsumsi obat tradisional sebanyak 23,04 persen, dan menggunakan cara lainnya sebanyak 3,09 persen. Dilihat dari aspek kesehatan mengobati sendiri merupakan cara berobat yang tidak direkomendasikan, karena pengobatan harus disertai dengan pemeriksaan dari tenaga medis terlebih dahulu.



5.2. Penolong kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga media seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Pada periode 2010-2014 penolong kelahiran balita di Sumatera Utara pada umumnya adalah bidan. Tingginya persentase kelahiran yang ditolong oleh bidan, sangat mungkin disebabkan ketersediaan dan tingkat kepercayaan terhadap bidan relatif tinggi. Tenaga penolong kelahiran lainnya yang cukup tinggi adalah dokter, yang berarti masyarakat mulai sedikit demi sedikit mengurangi peranan dukun. Sejak tahun 2010 terjadi peningkatan peran dokter dalam penolong kelahiran sehingga persentase penolong kelahiran oleh dukun/lainnya semakin rendah. Pada tahun 2014 sebanyak 74,73 persen proses kelahiran ditolong oleh bidan, kemudian 16,14 persen oleh dokter dan sisanya 7,72 persen kelahiran masih ditolong dukun/lainnya.

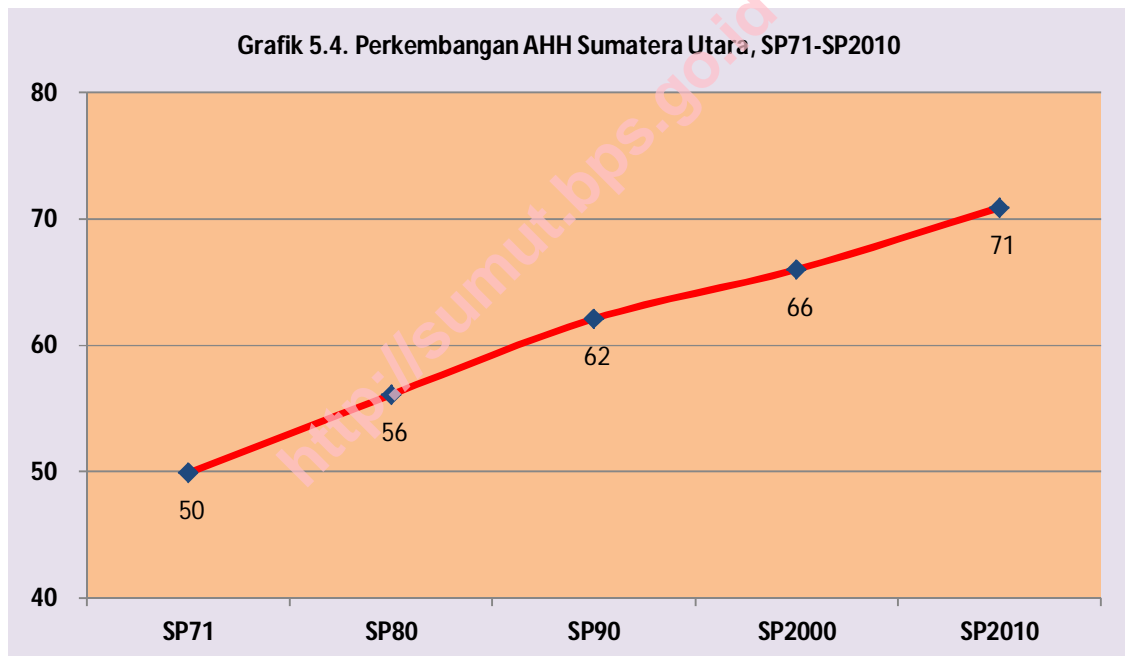


Masih cukup besarnya peran dukun dalam membantu kelahiran balita perlu terus mendapat perhatian. Usaha yang mungkin dapat dilakukan adalah menambah kekurangan tenaga medis secara merata di daerah-daerah tertentu di Sumatera Utara serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan dukun bayi agar mengerti tata cara menolong kelahiran yang aman dan sehat. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa di daerah tertentu masyarakat dengan alasan ekonomi dan pendidikan masih cenderung percaya kepada dukun dibandingkan dengan tenaga medis.

Tenaga penolong kelahiran oleh dokter mulai mempunyai peran yang meningkat, dan biasanya hanya pada kasus tertentu saja proses kelahiran ditolong oleh dokter yaitu jika bidan sudah merasa tidak mampu lagi karena terjadi masalah. Namun data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kelahiran yang ditolong oleh dokter yaitu dari 13,27 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 16,14 persen pada tahun 2014.

5.3. Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Grafik 5.4. menunjukkan perkembangan AHH Sumatera Utara hasil SP71 sampai dengan SP2010.



Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

FERTILITAS DAN KB

Fertilitas menyangkut banyaknya anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan sangat erat kaitannya terhadap beban rumah tangga. Bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara untuk mencapai keluarga sejahtera. Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan yang menjadi sasaran adalah usia antara 15-49 tahun. Hal ini disebabkan kemungkinan wanita melahirkan pada usia tersebut cukup besar. Oleh sebab itu selain informasi tentang kelahiran, informasi terkait partisipasi keluarga berencana menjadi penting sebagai dasar bagi kebijakan pengendalian kelahiran.

Selain itu, hal lain yang cukup penting diperhatikan dalam melihat tingkat kelahiran ini adalah usia wanita saat perkawinan pertama. Semakin muda usia saat perkawinan pertamanya, semakin besar risiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum matangnya rahim wanita muda untuk memproduksi anak, atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama, semakin tinggi risiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

6.1. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya melahirkan anak.

Berdasarkan Tabel 6.1, sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (56,86 persen) kemudian diikuti usia 25-34 tahun (18,87 persen) dan usia 17-18 tahun (16,63 persen). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa masih ada sebanyak 6,72 persen wanita berumur 10 tahun ke Atas yang usia pada perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun dan dinilai masih terlalu muda.

Tabel 6.1. Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara, 2014

Usia Perkawinan Pertama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 16	5,35	8,03	6,72
17 – 18	13,73	19,39	16,63
19 – 24	56,10	57,58	56,86
25 – 34	23,70	14,30	18,87
35 +	1,12	0,71	0,91

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

Dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan, bahwa perkawinan dalam usia muda lebih banyak terjadi di daerah perdesaan. Selanjutnya menurut Kabupaten/kota, persentase wanita yang pernah kawin pada usia muda (kurang dari 17 tahun) cukup bervariasi, dengan persentase terendah di Kabupaten Tobas Samosir (1,00 persen) dan yang tertinggi di Kabupaten Mandailing Natal (14,78 persen). Usia perkawinan di bawah usia 17 tahun menurut daerah Kabupaten/kota ditampilkan pada Grafik 6.1. Untuk daerah kota, persentase wanita dengan usia kawin pertama di bawah 17 tahun tertinggi adalah Kota Tanjung Balai (8,45 persen) dan terendah berada di Kota Medan (2,89 persen).

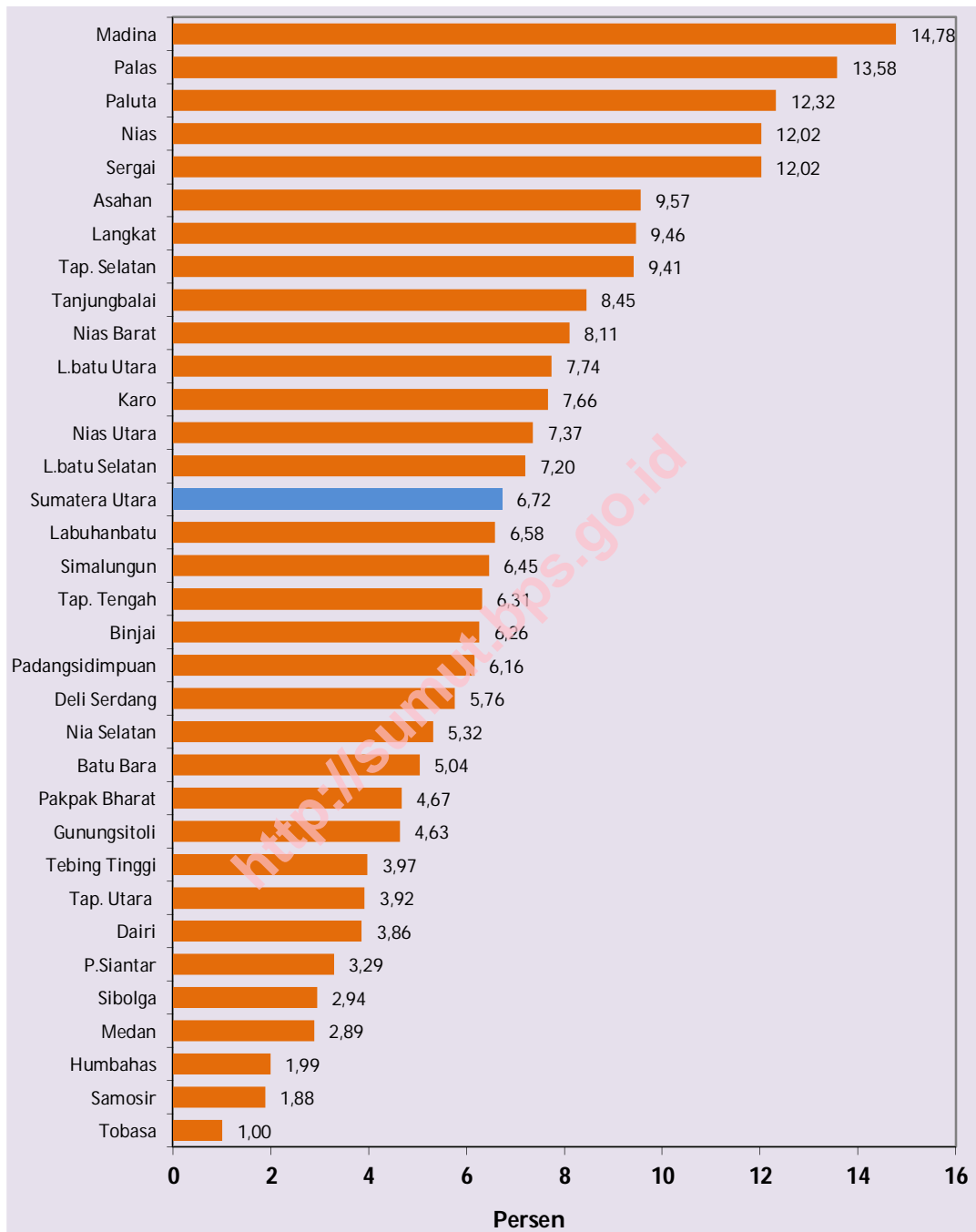
6.2. Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan cukup lama. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang pernah menggunakan/memakai alat/cara KB pada tahun 2014 sebesar 71,71 persen, dengan rincian 72,50 persen di perkotaan dan 70,96 persen di perdesaan. Persentase wanita yang pernah ikut KB di Kabupaten/kota tersebut sangat bervariasi. Di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah yang tertinggi yakni 90,93 persen, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan sangat rendah, yaitu hanya sebesar 41,87 persen. Persentase wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB sebesar 51,87 persen. Dari persentase wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut di antaranya menggunakan alat/cara suntik (49,98 persen), pil KB (26,87 persen) dan susuk KB (6,78 persen). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai dan mudah pemakaiannya.

Grafik 6.1. Persentase Wanita Usia Kawin Pertama di Bawah 17 tahun menurut Kabupaten/kota, 2014



Tabel 6.2. Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun Berstatus Kawin menurut Kabupaten/kota dan Status Penggunaan Alat/cara KB, 2014

Kabupaten/kota	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tdk Pernah Menggunakan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Nias	34,84	12,82	52,35	100,00
2. Mandailing Natal	35,49	24,34	40,18	100,00
3. Tapanuli Selatan	43,33	21,08	35,58	100,00
4. Tapanuli Tengah	39,12	19,78	41,10	100,00
5. Tapanuli Utara	38,69	16,00	45,31	100,00
6. Toba Samosir	45,73	14,52	39,75	100,00
7. Labuhanbatu	71,78	18,69	9,53	100,00
8. Asahan	55,61	20,14	24,25	100,00
9. Simalungun	48,49	17,48	34,03	100,00
10. Dairi	42,50	17,98	39,51	100,00
11. Karo	64,79	14,93	20,28	100,00
12. Deli Serdang	57,60	21,75	20,65	100,00
13. Langkat	64,47	20,70	14,84	100,00
14. Nias Selatan	37,32	4,55	58,13	100,00
15. Humbang Hasundutan	31,15	16,37	52,48	100,00
16. Pakpak Barat	38,48	20,93	40,59	100,00
17. Samosir	38,97	20,30	40,73	100,00
18. Serdang Bedagai	53,59	24,02	22,38	100,00
19. Batubara	60,62	20,94	18,45	100,00
20. Padang Lawas Utara	38,84	23,07	38,09	100,00
21. Padang Lawas	31,53	28,41	40,06	100,00
22. Labuhanbatu Selatan	63,41	26,90	9,69	100,00
23. Labuhanbatu Utara	63,29	27,65	9,07	100,00
24. Nias Utara	49,93	15,04	35,02	100,00
25. Nias Barat	30,48	13,52	56,00	100,00
Kota				
71. Sibolga	56,48	16,51	27,01	100,00
72. Tanjungbalai	54,23	14,77	30,99	100,00
73. Pematangsiantar	39,68	22,23	38,09	100,00
74. Tebing Tinggi	53,57	22,54	23,88	100,00
75. Medan	46,99	16,81	36,20	100,00
76. Binjai	55,09	20,10	24,81	100,00
77. Padangsidimpuan	48,15	23,78	28,06	100,00
78. Gunungsitoli	34,91	15,95	49,15	100,00
Sumatera Utara	51,87	19,84	28,29	100,00
• Perkotaan	53,25	19,25	27,51	100,00
• Perdesaan	50,57	20,39	29,03	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

Tabel 6.3. Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/kota dan Alat/cara KB yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Kabupaten/kota	MOW/ MOP	IUD/ AKDR/ Spiral	Suntik	Susuk KB	Pil KB	Kondom/ Intravag	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten							
1. Nias	5,85	1,15	71,23	9,11	4,55	0,00	8,10
2. Mandailing Natal	2,58	1,00	73,15	2,92	14,69	0,00	5,66
3. Tapanuli Selatan	8,46	6,40	48,19	22,45	9,14	0,86	4,50
4. Tapanuli Tengah	14,97	3,84	44,42	19,05	14,87	0,01	2,85
5. Tapanuli Utara	26,87	0,39	37,60	19,89	3,95	3,89	7,41
6. Toba Samosir	47,72	4,68	19,49	15,15	3,90	2,23	6,83
7. Labuhanbatu	1,12	0,00	63,42	4,17	25,39	0,00	5,90
8. Asahan	6,90	2,83	31,22	9,74	35,14	1,43	12,73
9. Simalungun	11,00	4,50	45,61	13,23	11,43	4,03	10,20
10. Dairi	15,46	2,14	50,03	21,59	3,69	0,37	6,71
11. Karo	12,88	2,85	49,36	11,41	13,30	4,49	5,70
12. Deli Serdang	6,26	2,80	50,48	1,75	33,34	1,44	3,92
13. Langkat	3,05	1,80	38,79	4,98	49,22	0,96	1,21
14. Nias Selatan	2,25	0,91	72,36	1,77	8,64	12,50	1,57
15. Humbang Hasundutan	16,87	6,31	48,01	20,50	8,30	0,00	0,00
16. Pakpak Barat	17,74	2,61	40,54	18,09	10,83	1,52	8,66
17. Samosir	32,71	12,50	30,23	14,71	7,24	0,00	2,61
18. Serdang Bedagai	6,45	2,00	55,23	5,64	23,89	2,53	4,26
19. Batubara	2,64	0,66	43,63	3,77	46,25	0,69	2,36
20. Padang Lawas Utara	0,48	3,26	68,41	3,77	23,54	0,00	0,53
21. Padang Lawas	1,11	0,00	61,76	4,22	30,87	2,04	0,00
22. Labuhanbatu Selatan	0,00	1,03	77,33	1,28	18,90	0,15	1,31
23. Labuhanbatu Utara	1,46	0,00	50,44	2,78	38,65	6,00	0,67
24. Nias Utara	2,86	2,67	83,40	1,39	7,34	0,00	2,35
25. Nias Barat	4,14	6,13	76,52	10,57	2,63	0,00	0,00
Kota							
71. Sibolga	9,28	3,76	46,34	23,95	11,24	3,64	1,79
72. Tanjungbalai	2,65	1,22	48,17	2,70	40,86	0,89	3,52
73. Pematangsiantar	16,34	16,85	41,02	11,18	12,50	1,15	0,96
74. Tebing Tinggi	4,37	0,00	52,11	5,87	33,16	0,00	4,49
75. Medan	10,30	6,33	45,81	7,74	20,57	2,01	7,23
76. Binjai	5,90	9,06	29,25	2,91	49,85	1,79	1,25
77. Padangsidimpuan	2,51	8,71	54,57	5,15	14,42	0,00	14,64
78. Gunungsitoli	16,47	22,95	46,20	4,24	6,53	0,00	3,61
78. Gunungsitoli	5,85	1,15	71,23	9,11	4,55	0,00	8,10
Sumatera Utara	7,27	3,37	48,98	6,78	26,87	1,83	4,91
• Perkotaan	7,85	5,03	46,67	5,58	27,50	2,02	5,36
• Perdesaan	6,71	1,72	51,26	7,96	26,25	1,64	4,47

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

KEMISKINAN, POLA KONSUMSI DAN IPM

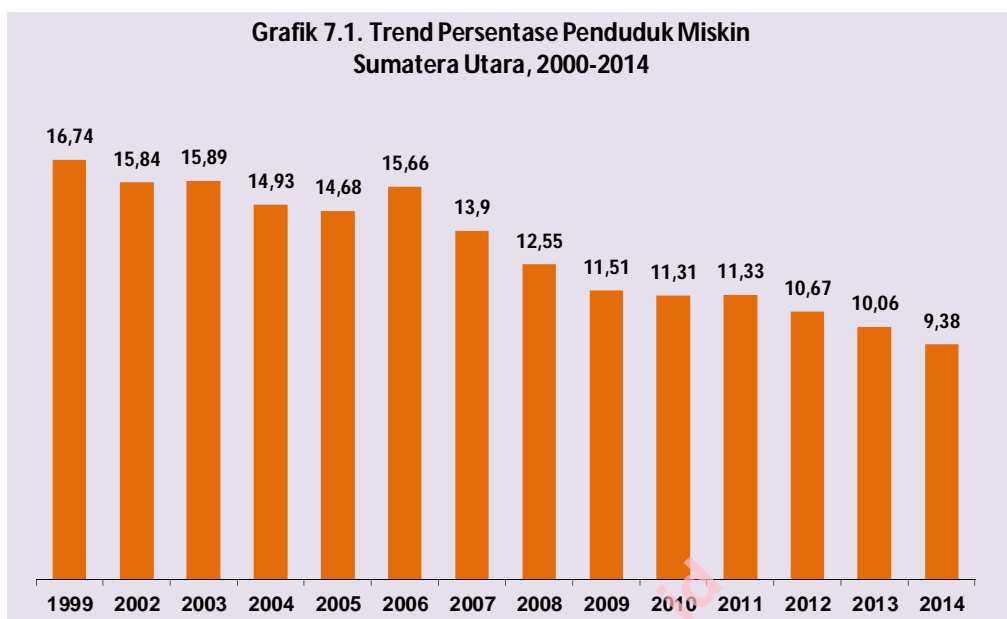
7.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 1999 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara sekitar 16,74 persen kemudian turun menjadi 15,89 persen, pada tahun 2003. Angka ini kembali turun menjadi 12,55 persen pada tahun 2008 dan 9,38 persen pada tahun 2014.



Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. kedalaman kemiskinan menggambarkan *gap* atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data pada Tabel 7.1. pada tahun 2014, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Demikian juga dilihat dari keparahannya kemiskinan di perdesaan lebih parah dibanding perkotaan, hal ini tergambar melalui indeks keparahan perdesaan yang lebih tinggi dibanding perkotaan.

Tabel 7.1. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P_2) di Sumatera Utara, Maret 2014

Indeks	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks kedalaman kemiskinan (P_1)	1,24	1,69	1,47
Indeks keparahan kemiskinan (P_2)	0,30	0,44	0,37

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

7.2. Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Tabel 7.2. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 1995-2014

Tahun	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1995	32 003	66,76	15 932	33,24	47 935	100,00
1996	37 498	66,03	19 291	33,97	56 789	100,00
1997	38 987	65,54	20 499	34,46	59 486	100,00
1998	50 151	68,35	23 223	31,65	73 374	100,00
1999	86 304	72,78	32 465	27,22	119 269	100,00
2000	91 874	72,15	35 465	27,85	127 339	100,00
2001	102 089	70,46	42 809	29,54	144 898	100,00
2002	122 024	68,15	57 018	31,85	179 042	100,00
2003	134 681	67,85	198 497	32,15	198 497	100,00
2004	136 526	64,22	76 059	35,78	212 585	100,00
2005	168 655	60,20	121 933	39,80	287 480	100,00
2006	185 207	58,60	130 862	41,40	316 070	100,00
2007	204 914	60,20	135 473	39,80	340 387	100,00
2008	273 858	55,30	221 407	44,70	495 265	100,00
2009	280 155	56,87	212 476	43,13	492 631	100,00
2010	321 539	57,45	238 138	42,55	559 678	100,00
2011	337 757	56,00	265 402	44,00	603 159	100,00
2012	345 671	56,03	271 302	43,97	616 973	100,00
2013	375 465	55,91	296 086	44,09	671 551	100,00
2014	397 141	56,58	304 828	43,42	701 969	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2014 sebesar Rp. 701.969,- yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 397.141,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 304.828,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan).

Persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga di daerah perdesaan lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 62,22 persen untuk daerah perdesaan dan 51,97 persen untuk daerah perkotaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah perdesaan masih cenderung menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk keperluan konsumsi makanan. Sedangkan di daerah perkotaan, porsi untuk konsumsi makanan sudah mulai dialihkan kepada keperluan lain di luar konsumsi makanan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan relatif lebih baik dibanding di perdesaan.

Persentase pengeluaran untuk makanan di daerah kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan daerah kota. Persentase tertinggi di Kabupaten Nias Selatan (70,14 persen), diikuti Kabupaten Nias Barat (69,02 persen). Sedangkan persentase terendah pengeluaran untuk makanan terjadi di Kota Medan (47,45 persen) dan Kota Gunung Sitoli (54,19 persen).

Tabel 7.3. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/kota, 2014

Kabupaten/kota	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	66,05	33,95	100,00
2. Mandailing Natal	62,24	37,76	100,00
3. Tapanuli Selatan	64,83	35,17	100,00
4. Tapanuli Tengah	64,43	35,57	100,00
5. Tapanuli Utara	63,08	36,92	100,00
6. Toba Samosir	61,13	38,87	100,00
7. Labuhanbatu	57,05	42,95	100,00
8. Asahan	54,10	45,90	100,00
9. Simalungun	54,17	45,83	100,00
10. Dairi	65,28	34,72	100,00
11. Karo	64,39	35,61	100,00
12. Deli Serdang	55,54	44,46	100,00
13. Langkat	60,32	39,68	100,00
14. Nias Selatan	70,14	29,86	100,00
15. Humbang Hasundutan	66,97	33,03	100,00
16. Pakpak Barat	62,39	37,61	100,00
17. Samosir	60,54	39,46	100,00
18. Serdang Bedagai	59,56	40,44	100,00
19. Batubara	65,53	34,47	100,00
20. Padang Lawas Utara	67,71	32,29	100,00
21. Padang Lawas	67,03	32,97	100,00
22. Labuhanbatu Selatan	57,58	42,42	100,00
23. Labuhanbatu Utara	58,57	41,43	100,00
24. Nias Utara	66,35	33,65	100,00
25. Nias Barat	69,02	30,98	100,00
Kota			
71. Sibolga	56,92	43,08	100,00
72. Tanjungbalai	62,88	37,12	100,00
73. Pematangsiantar	54,32	45,68	100,00
74. Tebing Tinggi	55,53	44,47	100,00
75. Medan	47,45	52,55	100,00
76. Binjai	54,58	45,42	100,00
77. Padangsidimpuan	54,70	45,30	100,00
78. Gunungsitoli	54,19	45,81	100,00
Sumatera Utara	56,58	43,42	100,00
• Perkotaan	51,97	48,03	100,00
• Perdesaan	62,22	37,78	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

7.3. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia. Indeks ini dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

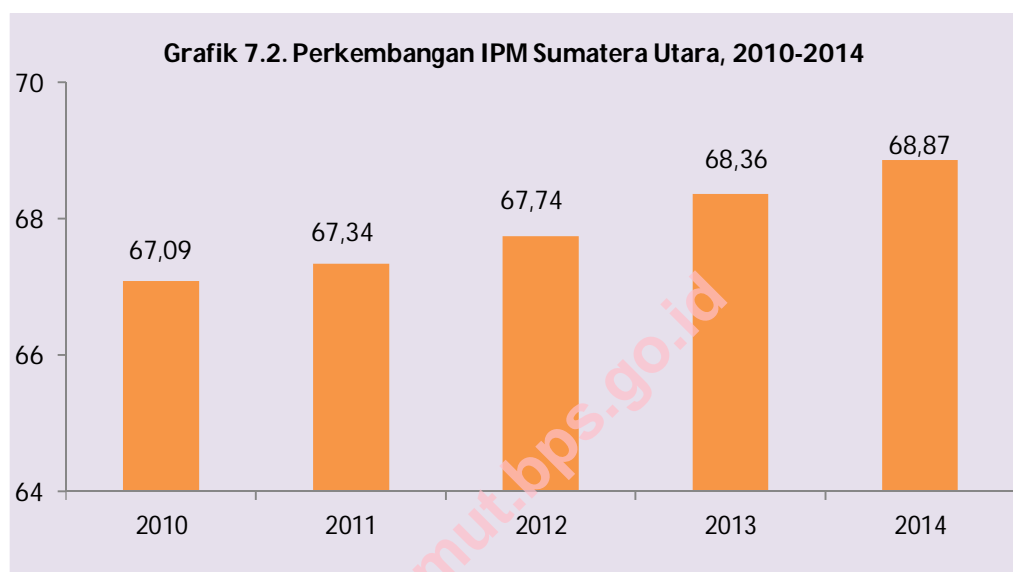
Konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik namun memiliki kualitas pembangunan manusia yang rendah. Hal ini mungkin terjadi karena tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi di suatu daerah tersebut belum tentu dinikmati langsung oleh masyarakatnya.

Untuk melihat perkembangan IPM di kabupaten/kota, maka tingkatan status pembangunan manusia berdasarkan metode baru penghitungan IPM dibedakan 4 kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah, hal ini mengindikasikan kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah, berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Tabel 7.4. Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Selama periode 2010-2014 kualitas pembangunan manusia di Sumatera Utara terus meningkat dan berada pada status sedang. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 nilai IPM Sumatera Utara berdasarkan metode baru meningkat dari 67,1 pada tahun 2010 menjadi 67,7 pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 kembali meningkat menjadi masing-masing 68,4 dan 68,9.



Kondisi pembangunan manusia berdasarkan kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 7.5. Pada tahun 2014 kualitas pembangunan manusia yang dilihat melalui IPM di Kota Medan adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 78,26 atau tergolong status tinggi kemudian disusul Kota Pematangsiantar yang sebesar 75,83 yang juga tergolong kualitas tinggi. Kondisi sebaliknya terjadi pada kabupaten yang terdapat di Kepulauan Nias yaitu Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias, dimana daerah ini memiliki kualitas pembangunan manusia yang paling rendah di Sumatera Utara dan juga masih dalam status rendah karena memiliki nilai IPM dibawah 60.

Tabel 7.5. Tingkat dan Status Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota, 2013-2014 (Berdasarkan Metode Baru)

Kabupaten/kota (1)	2013			2014		
	IPM (2)	Status (3)	Rangking (4)	IPM (5)	Status (6)	Rangking (7)
Kabupaten						
1. Nias	57,43	Rendah	31	57,98	Rendah	31
2. Mandailing Natal	62,91	Sedang	29	63,42	Sedang	29
3. Tapanuli Selatan	66,75	Sedang	19	67,22	Sedang	20
4. Tapanuli Tengah	65,64	Sedang	22	66,16	Sedang	22
5. Tapanuli Utara	70,50	Tinggi	9	70,70	Tinggi	11
6. Toba Samosir	72,36	Tinggi	3	72,79	Tinggi	3
7. Labuhanbatu	69,45	Sedang	12	70,06	Tinggi	12
8. Asahan	66,58	Sedang	20	67,51	Sedang	19
9. Simalungun	70,28	Tinggi	11	70,89	Tinggi	10
10. Dairi	67,15	Sedang	16	67,91	Sedang	16
11. Karo	71,62	Tinggi	7	71,84	Tinggi	8
12. Deli Serdang	71,39	Tinggi	8	71,98	Tinggi	6
13. Langkat	67,17	Sedang	15	68,00	Sedang	15
14. Nias Selatan	56,78	Rendah	32	57,78	Rendah	32
15. Humbang Hasundutan	64,92	Sedang	26	65,59	Sedang	25
16. Pakpak Barat	64,73	Sedang	27	65,06	Sedang	28
17. Samosir	66,80	Sedang	18	67,80	Sedang	17
18. Serdang Bedagai	67,11	Sedang	17	67,78	Sedang	18
19. Batubara	65,06	Sedang	25	65,50	Sedang	26
20. Padang Lawas Utara	66,13	Sedang	21	66,50	Sedang	21
21. Padang Lawas	64,62	Sedang	28	65,50	Sedang	27
22. Labuhanbatu Selatan	67,78	Sedang	14	68,59	Sedang	14
23. Labuhanbatu Utara	68,28	Sedang	13	69,15	Sedang	13
24. Nias Utara	58,29	Rendah	30	59,18	Rendah	30
25. Nias Barat	56,58	Rendah	33	57,54	Rendah	33
Kota						
71. Sibolga	70,45	Tinggi	10	71,01	Tinggi	9
72. Tanjungbalai	65,40	Sedang	23	66,05	Sedang	23
73. Pematangsiantar	75,05	Tinggi	2	75,83	Tinggi	2
74. Tebing Tinggi	71,85	Tinggi	5	72,13	Tinggi	5
75. Medan	78,00	Tinggi	1	78,26	Tinggi	1
76. Binjai	72,02	Tinggi	4	72,55	Tinggi	4
77. Padangsidimpuan	71,68	Tinggi	6	71,88	Tinggi	7
78. Gunungsitoli	65,25	Sedang	24	65,91	Sedang	24
Sumatera Utara	68,36	Sedang		68,87	Sedang	

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

KETENAGAKERJAAN

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertumbuhan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 8.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2012-2014

Kegiatan	2012		2013		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
Angkatan kerja	6 131 664	69,41	6 311 762	70,67	6 272 083	67,07
- Bekerja	5 751 682	65,11	5 899 560	66,05	5 881 379	62,89
- Pengangguran	379 982	4,30	412 202	4,62	390 712	4,18
Bukan Angkatan kerja	2 702 653	30,59	2 619 661	29,33	3 074 958	32,93
Jumlah	8 834 317	100,00	8 931 423	100,00	9 351 041	100,00
T P A K (%)	69,41		70,67		67,07	
TPT (%)	6,20		6,53		6,23	

Sumber : Sakernas Agustus 2012-2014

8.1. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)

Pada tahun 2014, jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Utara adalah 9.351.041 orang yang terdiri dari 6.272.083 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 3.074.958 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

TPAK Sumatera Utara tahun 2014 adalah sebesar 67,07 persen, artinya bahwa pada tahun 2014 sebanyak 67,07 persen penduduk usia kerja di Sumatera Utara siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan naik turun. Pada tahun 2012, TPAK Sumatera Utara 69,41 persen, kemudian meningkat menjadi 70,67 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 menurun menjadi 67,07 persen. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki TPAK paling tinggi, yaitu sebesar 91,59 persen, dan sebaliknya Kabupaten Batubara merupakan yang terendah dengan TPAK sebesar 57,42 persen.

8.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2014 di Sumatera Utara sebesar 6,23 persen. Angka ini menurun dibanding tahun 2013 dan lebih tinggi sedikit dibandingkan

tahun 2012 yang masing-masing sebesar 6,53 persen dan 6,20 persen. kecenderungan menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini tentunya sinyal positif bagi kesejahteraan di Sumatera Utara yang pada akhirnya akan dapat berakibat pada menurunnya kerawanan sosial.

Tabel 8.2 Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun ke Atas menurut Kabupaten/kota dan Kegiatan serta TPT dan TPAK, 2014

Kabupaten/Kota	Angkatan kerja			Bukan Angkatan kerja	Penduduk 15+	TPT	TPAK
	Bekerja	Pengangguran	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten							
1. Nias	72 485	320	72 805	7 344	80 149	0,44	90,84
2. Mandailing Natal	188 042	13 170	201 212	73 076	274 288	6,55	73,36
3. Tapanuli Selatan	123 301	10 146	133 447	41 659	175 106	7,60	76,21
4. Tapanuli Tengah	144 474	7 447	151 921	62 120	214 041	4,90	70,98
5. Tapanuli Utara	155 099	914	156 013	29 759	185 772	0,59	83,98
6. Toba Samosir	90 315	668	90 983	25 473	116 456	0,73	78,13
7. Labuhanbatu	175 507	14 682	190 189	110 652	300 841	7,72	63,22
8. Asahan	279 873	5 237	285 110	189 758	474 868	1,84	60,04
9. Simalungun	368 425	29 803	398 228	183 899	582 127	7,48	68,41
10. Dairi	148 471	2 266	150 737	24 986	175 723	1,50	85,78
11. Karo	206 709	2 130	208 839	53 047	261 886	1,02	79,74
12. Deli Serdang	835 162	62 871	898 033	480 990	1 379 023	7,00	65,12
13. Langkat	408 682	28 893	437 580	259 149	696 729	6,60	62,80
14. Nias Selatan	156 236	768	157 004	28 643	185 647	0,49	84,57
15. Humbang Hasundutan	101 408	366	101 774	9 343	111 117	0,36	91,59
16. Pakpak Barat	23 685	642	24 327	2 980	27 307	2,64	89,09
17. Samosir	69 974	741	70 715	7 930	78 645	1,05	89,92
18. Serdang Bedagai	253 501	19 491	272 992	143 974	416 966	7,14	65,47
19. Batubara	141 156	11 312	152 468	113 072	265 540	7,42	57,42
20. Padang Lawas Utara	100 556	12 297	112 853	38 714	151 567	10,90	74,46
21. Padang Lawas	91 862	5 516	97 378	58 017	155 395	5,66	62,66
22. Labuhanbatu Selatan	117 898	5 977	123 875	74 081	197 956	4,83	62,58
23. Labuhanbatu Utara	125 190	15 278	140 468	87 446	227 914	10,88	61,63
24. Nias Utara	63 406	1 765	65 171	14 562	79 733	2,71	81,74
25. Nias Barat	43 876	442	44 318	6 664	50 982	1,00	86,93
Kota							
71. Sibolga	35 961	5 094	41 055	19 067	58 358	12,41	70,35
72. Tanjungbalai	62 958	5 511	68 469	41 712	109 088	8,05	62,76
73. Pematangsiantar	91 802	9 373	101 175	60 802	176 050	9,26	57,47
74. Tebing Tinggi	65 889	5 135	71 024	39 531	110 220	7,23	64,44
75. Medan	882 514	92 437	974 951	547 285	1 613 984	9,48	60,41
76. Binjai	111 172	9 139	120 311	68 971	188 424	7,60	63,85
77. Padangsidempuan	92 893	6 238	99 131	46 926	141 151	6,29	70,23
78. Gunungsitoli	52 889	4 638	57 527	26 626	87 988	8,06	65,38
Sumatera Utara	5 881 371	390 712	6.272.083	3 078 958	9 351 041	6,23	67,07

Sumber : Sakernas Agustus 2014

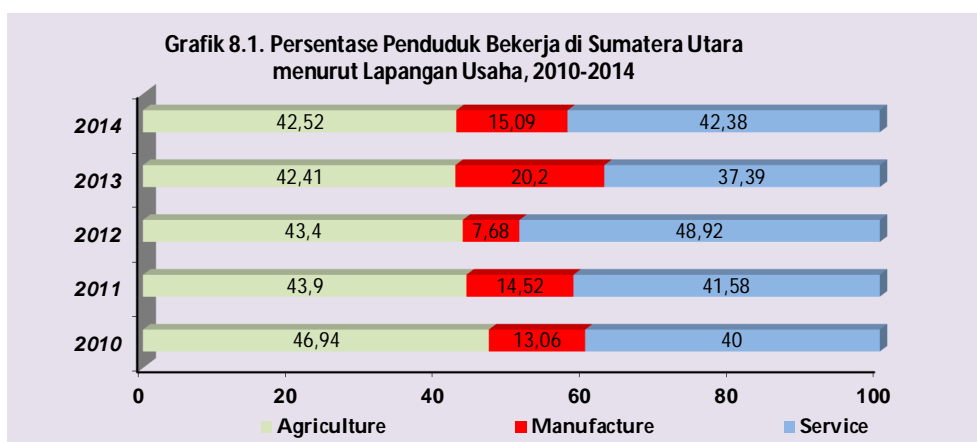
Hal yang cukup menarik jika mencermati TPT menurut Kabupaten/kota, daerah kota umumnya memiliki TPT relatif tinggi dan umumnya diatas atau mendekati 10 persen, sebaliknya di daerah kabupaten umumnya rendah. TPT tertinggi adalah TPT Kota Sibolga sebesar 12,41 dan yang terendah adalah TPT Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,36. Hal ini dapat dipahami bahwa di kabupaten pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda di kota dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

8.3. Karakteristik Penduduk Bekerja

8.3.1. Lapangan Pekerjaan

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara. Perkembangan 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2010 sebanyak 46,94 persen penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor *agriculture*/pertanian, kemudian diikuti sektor *service* (angkutan, perdagangan, keuangan dan jasa) sebesar 40 persen dan sisanya 13,06 persen pada sektor *manufacture* (pertambangan/penggalian, industri, listrik gas dan air serta bangunan) seperti yang terlihat pada Grafik 8.1.

Pada tahun 2014 kondisinya relatif sama, yaitu pertanian masih mendominasi walaupun menunjukkan penurunan yaitu 42,52 persen, diikuti sektor *service* sebesar 42,38 persen serta sektor *manufacture* sebesar 15,09 persen. Besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Sumatera Utara karena Sumatera Utara memiliki potensi pertanian tanam pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan subur.



Pada Tabel 8.3 menunjukkan bahwa pertanian mendominasi lapangan pekerjaan di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Deli Serdang yang didominasi sektor *service*. Demikian juga untuk daerah perkotaan, sektor *service* sangat dominan utamanya perdagangan dan jasa kecuali Kota Gunungsitoli yang masih didominasi sektor pertanian.

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Usaha, 2014

Kabupaten/kota	Lapangan Usaha			Total
	Agriculture	Manufacture	Service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Nias	92,37	0,50	7,13	100,00
2. Mandailing Natal	58,70	9,00	32,30	100,00
3. Tapanuli Selatan	71,24	5,52	23,24	100,00
4. Tapanuli Tengah	61,96	6,46	31,58	100,00
5. Tapanuli Utara	77,36	6,02	16,61	100,00
6. Toba Samosir	56,16	9,97	33,87	100,00
7. Labuhanbatu	49,70	7,23	43,07	100,00
8. Asahan	50,78	8,24	40,98	100,00
9. Simalungun	53,97	11,30	34,73	100,00
10. Dairi	75,55	2,67	21,78	100,00
11. Karo	77,02	2,52	20,47	100,00
12. Deli Serdang	17,01	37,20	45,79	100,00
13. Langkat	44,56	16,08	39,36	100,00
14. Nias Selatan	86,86	0,83	12,31	100,00
15. Humbang Hasundutan	82,09	3,98	13,93	100,00
16. Pakpak Barat	80,02	0,65	19,33	100,00
17. Samosir	69,52	6,98	23,50	100,00
18. Serdang Bedagai	44,17	18,74	37,09	100,00
19. Batubara	36,79	22,58	40,64	100,00
20. Padang Lawas Utara	73,11	0,98	25,91	100,00
21. Padang Lawas	68,63	4,48	26,89	100,00
22. Labuhanbatu Selatan	72,04	2,49	25,47	100,00
23. Labuhanbatu Utara	65,23	4,87	29,90	100,00
24. Nias Utara	73,96	2,49	23,55	100,00
25. Nias Barat	87,94	1,35	10,71	100,00
Kota				
71. Sibolga	92,37	0,50	7,13	100,00
72. Tanjungbalai	58,70	9,00	32,30	100,00
73. Pematangsiantar	71,24	5,52	23,24	100,00
74. Tebing Tinggi	61,96	6,46	31,58	100,00
75. Medan	77,36	6,02	16,61	100,00
76. Binjai	56,16	9,97	33,87	100,00
77. Padangsidimpuan	49,70	7,23	43,07	100,00
78. Gunungsitoli	50,78	8,24	40,98	100,00
Sumatera Utara	42,52	15,09	42,38	100,00

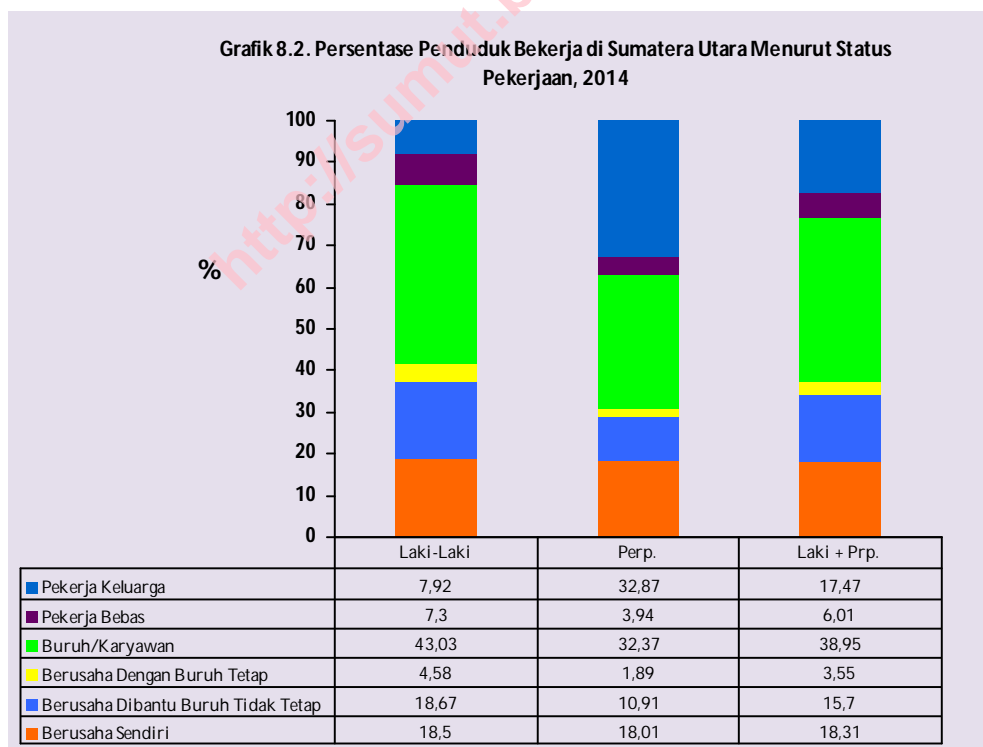
Sumber : Sakernas Agustus 2014

8.3.2. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 6 macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif 'tradisional'. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama di kalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

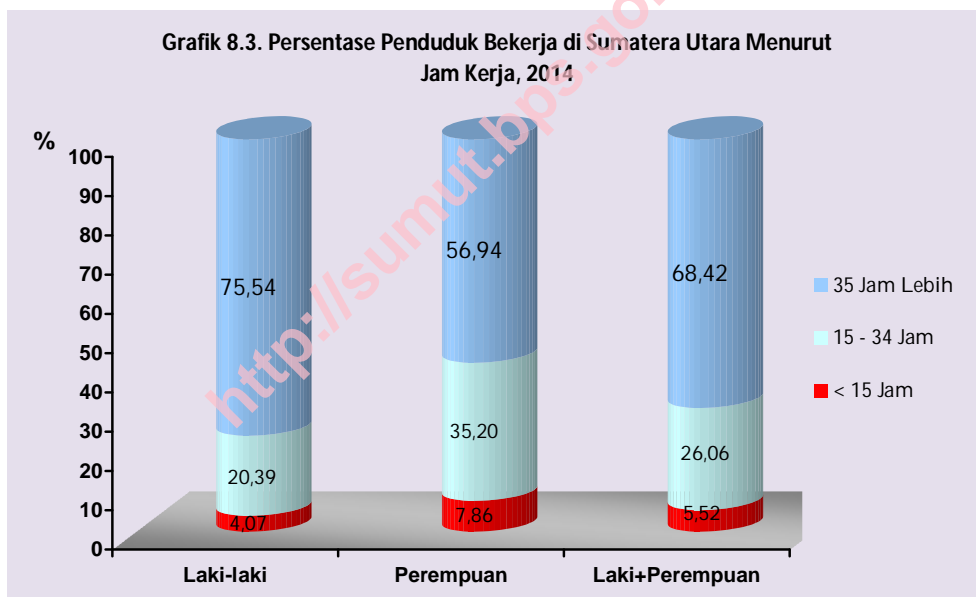
Pada umumnya penduduk Sumatera Utara yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Grafik 8.2. menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sebanyak 36,45 persen pekerja di Sumatera Utara berstatus buruh/karyawan, kemudian diikuti pekerja keluarga 21,28 persen dan 15,76 persen berusaha sendiri.



8.3.3. Jam kerja Seminggu

Jam kerja normal (35 jam seminggu atau lebih) masih dipakai sebagai patokan untuk mengelompokkan seorang pekerja, apakah ia termasuk pekerja penuh atau pekerja paruh waktu. Seorang pekerja dikatakan sebagai bekerja penuh (*full employed*) bila jam kerjanya mencapai 35 jam kerja atau lebih dalam seminggu. Sebaliknya dikatakan bekerja tidak penuh bila jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Grafik 8.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pekerja di Sumatera Utara yang mempunyai jam kerja normal sudah relatif tinggi, yaitu sebesar 58,29 persen. Jika 72,33 persen dan perempuan 41,90 persen. Sebaliknya untuk rata-rata jam kerja satu minggu dibawah jam kerja normal didominasi oleh perempuan. Hal ini sangat dimaklumi karena umumnya perempuan lebih memilih bekerja paruh waktu.



PERUMAHAN

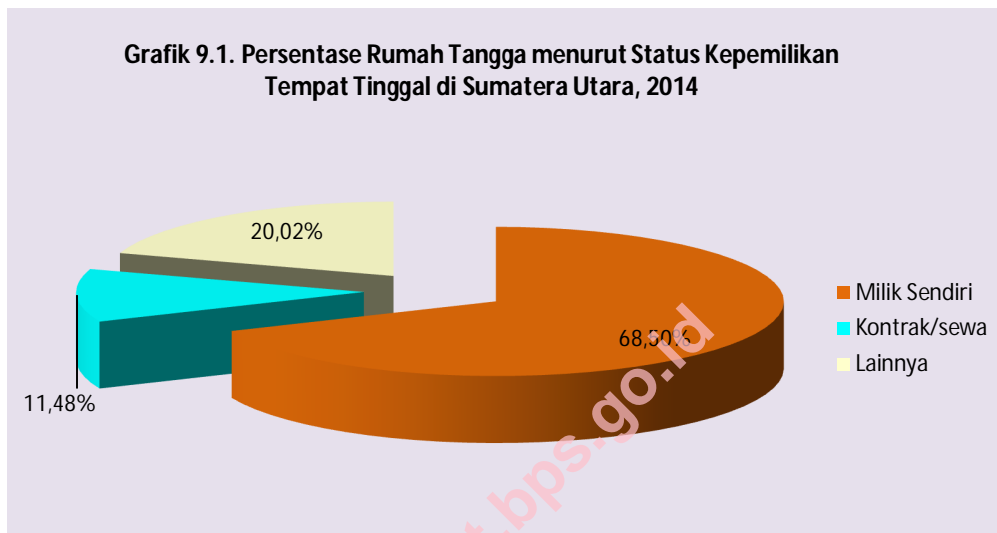
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

9.1. Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditempatinya.



Sekitar dua per tiga rumah tangga yang ada di Sumatera Utara (68,50 persen) mendiami rumah milik sendiri, dan sebanyak 11,48 persen rumah tangga masih menyewa/mengontrak, sedangkan sisanya (20,02 persen) mendiami rumah dinas/bebas sewa/rumah orang tua/famili dan lainnya. Persentase rumah tangga yang menyewa/mengontrak masih cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian. Mereka yang masih menyewa/mengontrak adalah rumah tangga baru atau mereka yang belum mampu memiliki rumah sendiri karena keterbatasan pendapatannya.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap (asbes/seng/genteng). ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota rumah tangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahtraannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya.

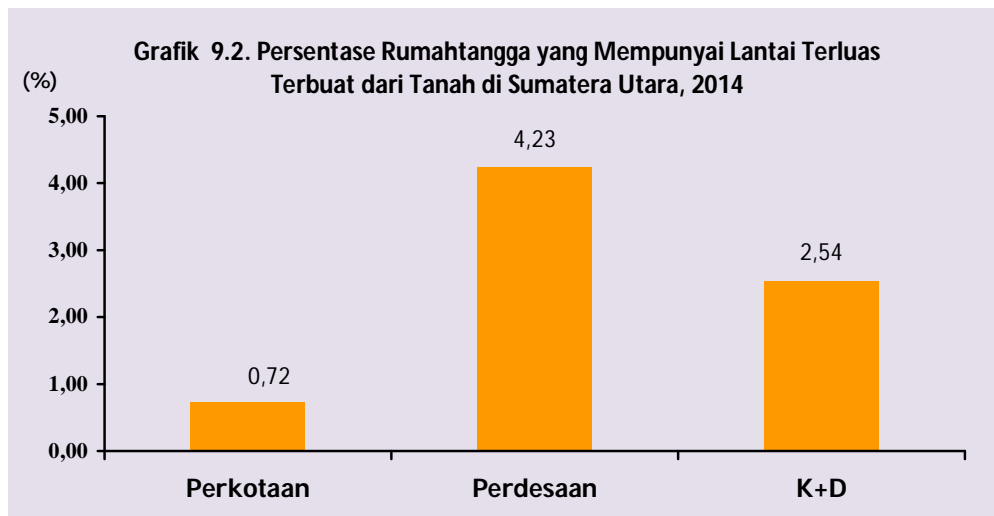
Tabel. 9.1. Kondisi Perumahan Sumatera Utara, 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rata-rata luas lantai perkapita (M ²)	18,07	22,36	20,16
2. Rumah tangga dengan lantai bukan tanah (%)	96,57	97,16	97,46
3. Rumah tangga dengan dinding rumah Tembok (%)	54,65	57,40	58,17
4. Rumah tangga dengan atap beton, genteng, sirap dan seng (%)	93,22	93,66	94,21

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Sumatera Utara menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai per kapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumah tangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumah tangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2014 rata-rata rumah tangga di Sumatera Utara memiliki luas lantai per kapita sekitar 20,16 m², meningkat dibanding tahun 2012 dan 2013 yang sebesar 18,07 m². dan 22,36 m².

Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada grafik 9.2 diketahui bahwa sekitar 2,54 persen rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara masih tinggal di rumah dengan lantai tanah. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah perdesaan, sebab masih 4,23 persen rumah tangga tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat.



Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2014, sekitar 58,17 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan dinding tembok. Selain tembok bahan lain yang cukup dominan adalah kayu yakni sekitar 37,39 persen. Hampir seluruhnya atau sekitar 93,87 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan atap seng, beton dan genteng.

9.2. Fasilitas Rumah

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama di antaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rumah tangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2014 sebanyak 95,97 persen rumah tangga di Sumatera Utara menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN dan ini meningkat dibanding tahun 2012 dan 2013 yang sebesar 95,27 dan 93,37 persen. Jika dilihat menurut daerahnya, penggunaan sumber penerangan berasal dari listrik di daerah perkotaan lebih tinggi (99,44 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (92,75 persen).

Tabel 9.2. Kondisi Fasilitas Rumah di Sumatera Utara, 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	95,27	93,37	95,97
2. Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri (%)	66,37	67,31	67,92
3. Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri (%)	77,62	78,06	79,75

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

Selanjutnya dari aspek sumber air minum, dapat dikatakan kondisinya masih jauh dari ideal. Hal ini ditunjukkan, hanya sekitar 67,92 persen rumah tangga di Sumatera Utara yang memiliki fasilitas air minum sendiri, sedangkan sisanya menggunakan fasilitas air minum secara bersama-sama bahkan tidak memiliki. Selain fasilitas kelayakan rumah dari aspek air minum dapat dilihat dari sumbernya karena kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Dibanding dengan sumber air lainnya, air kemasan merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya kemudian diikuti dengan air ledeng. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemar relatif cukup besar.

Tabel 9.3. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Sumatera Utara, 2014

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Air kemasan	47,51	16,00	31,17
2. Ledeng	23,70	4,94	13,97
3. Pompa	14,74	23,00	19,02
4. Sumur terlindungi	9,93	16,13	13,14
5. Sumur tdk terlindungi	1,76	8,05	5,02
6. Mata Air tidak terlindungi	0,35	6,98	3,79
7. Mata Air terlindungi	1,45	15,25	8,60
8. Air Sungai/hujan	0,46	9,23	5,00
9. Lainnya	0,12	0,43	0,28

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

Sebagian besar rumah tangga di Sumatera Utara menggunakan sumber air minum dari air kemasan yaitu mencapai 31,17 persen, pompa 19,02 persen dan air dari ledeng 13,97 persen. Di daerah perdesaan, penggunaan sumber air dari ledeng dan air kemasan lebih sedikit (20,94 persen) dibandingkan daerah perkotaan (68,21 persen). Sebaliknya, sumber air minum dari mata air, untuk daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini wajar karena pada sebagian daerah perdesaan banyak sumber mata air, dan tidak/belum tersedianya fasilitas air ledeng.

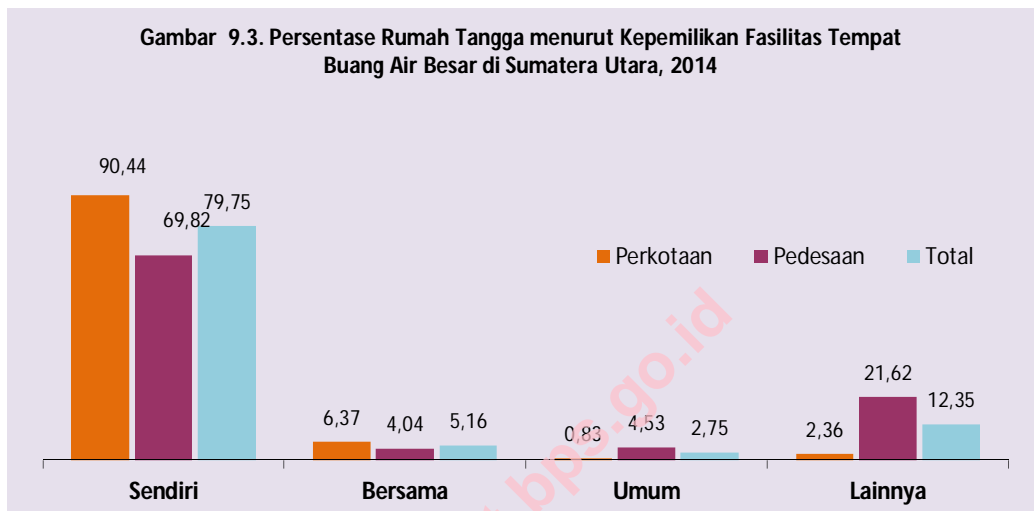
Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik merupakan pilihan terbanyak rumah tangga di daerah perkotaan yaitu sebesar 88,48 persen, sedangkan di perdesaan hanya 59,29 persen. Selain itu di daerah perdesaan masih terdapat sekitar 23,68 persen tempat penampungan di tempat lain dan 16,24 persen di sungai/danau/laut.

Tabel 9.4. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Utara, 2014

Tempat Penampungan Kotoran/tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tangki	88,48	59,29	73,31
2. Kolam/sawah	0,54	0,79	0,67
3. Sungai/Danau/Laut	4,00	16,24	10,35
4. Lainnya	6,97	23,68	15,64
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga di Sumatera Utara sudah mempunyai fasilitas sendiri (79,75 persen). Di daerah perkotaan, rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri jauh lebih besar yaitu mencapai 90,44 persen dibandingkan daerah pedesaan yang hanya 69,82 persen.



DATA

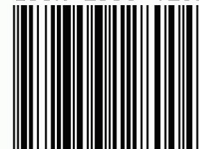
MENCERDASKAN BANGSA

<http://sumut.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Asrama No.179 Medan 20123
Telp (061) 8452343, Fax. (061) 8452773
Home Page : <http://sumut.bps.go.id>
Email : bps1200@bps.go.id

ISSN 2356-1289



9 772356 128004